
ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA
(Studi di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

Weni Rosdiana

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum - Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang, Surabaya 60231
email: Wena_23979@yahoo.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan yang ditinjau dari dimensi pemberdayaan dan bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dimensi pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger terdiri dari dimensi kesejahteraan perempuan, dimensi partisipasi, dimensi akses, dimensi penyadaran kritis dan dimensi kontrol. Selain itu, bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger pada pemberdayaan aspek sosial meliputi kegiatan rutin PKK, arisan dan pengajian. Pemberdayaan aspek politik bagi perempuan desa masih kurang karena perempuan desa belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Pemberdayaan perempuan pada aspek psikologis masih kurang dikarenakan perempuan desa masih kurang mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berargumentasi pada forum publik/desa.

Kata kunci : pemberdayaan, perempuan, desa

ANALYSIS OF RURAL WOMEN EMPOWERMENT
(Study in the Bulutengger village, Sekaran District, Lamongan Regency)

ABSTRACT

The purpose of this study described the empowerment in terms of empowerment dimensions and form of women empowerment in the Bulutengger village. This type of research was qualitative descriptive. The results of this study showed that the dimensions of the women empowerment in the Bulutengger village consists of women's welfare dimension, participation dimension, access dimensions, critical awareness dimensions and control dimensions. In addition, the form of women's empowerment in the Bulutengger village on empowering social aspects included regular activities of the fostering family welfare,

gathering and recitation. Political aspects showed that lack of rural women empowerment. It is caused rural women have not been involved in decision-making at the village level. Empowerment of women in the psychological aspects are lacking because rural women still lack the motivation to improve confidence in arguing in a public forum/village.

Keywords: empowerment, women, village

PENDAHULUAN

Desentralisasi desa menemui babak baru sejak disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Penetapan kebijakan desentralisasi desa tersebut memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Masyarakat desa tanpa terkecuali termasuk perempuan dapat terlibat sebagai subyek dalam pembangunan desa. Namun, pada realitanya keterlibatan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal pada masing-masing desa.

Kondisi tersebut yang juga tercermin dalam keterlibatan perempuan di Desa Bulutengger dalam aktivitas pembangunan desa yang masih rendah. Profil perempuan Desa Bulutengger pada umumnya masih berpendidikan rendah sebagai ibu rumah tangga, buruh tani, maupun berdagang kecil-kecilan di pasar atau di rumah. Selain itu, beberapa aktivitas lainnya yang mereka lakukan adalah mengikuti arisan atau pengajian rutin. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa aktivitas perempuan desa cenderung terbatas dan pasif untuk terlibat dalam pembangunan desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa

hambatan yang dialami oleh perempuan desa dalam keterlibatan pembangunan desa karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan ekonomi rumah tangganya, kondisi perempuan yang pasif, serta kondisi masyarakat desa yang masih paternalistik. Disisi lain, perempuan seringkali dihadapkan pada masalah rumahtangga terutama masalah ekonomi yang tidak jarang menyebabkan mereka terlilit hutang piutang pada rentenir.

Dukungan undang-undang dapat membangkitkan partisipasi perempuan desa. Namun, partisipasi dan kapasitas perempuan Desa Bulutengger masih perlu ditingkatkan dalam memperjuangkan kebutuhan mereka dalam pembangunan desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini proses pemberdayaan yang bukan hanya menekankan pada aspek ekonomi melainkan aspek-aspek lain yaitu politik, social dan psikologis (Friedman,1992). Hulme dan Turner (1990) mengatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Disamping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal (Shragge: 1993 dalam Prijono dan Pranarka:1996).

Pemberdayaan mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis (Friedman;1992). Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah suatu usaha bagaimana perempuan memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berprestasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan politik yaitu usaha bagaimana perempuan dapat memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Dan yang dimaksud dengan pemberdayaan psikologis yaitu usaha bagaimana membangun kepercayaan diri perempuan.

Selama ini, perempuan desa Bulutengger belum sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah desa. Contohnya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bulutengger memiliki porsi yang cukup besar untuk pembangunan fisik maupun belanja pegawai namun dukungan dana untuk kegiatan PKK di desa masih mendapatkan porsi yang sangat minim. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya perempuan desa masih kurang. Pemerintah desa juga kurang serius dan intensif memberikan motivasi dan kesempatan bagi perempuan desa untuk

terlibat dalam pembangunan desa. Dominasi laki-Laki dalam rapat RT/RW, dusun hingga desa sangat nampak. Akibatnya, kebijakan pembangunan desa kurang memperhitungkan keberadaan perempuan meskipun secara pribadi memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.

Perempuan merupakan potensi dan aset desa yang memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan umum. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian serius untuk memberdayakan perempuan desa melalui pelibatan secara langsung maupun tidak langsung perempuan desa dalam proses kebijakan pembangunan desa. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan desa sangat mungkin dilakukan melalui berbagai kegiatan guna memberdayakan mereka secara ekonomi, sosial, politik dan psikologis. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti meruuskan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimanakah dimensi pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger? dan bagaimanakah bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger? Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger yang ditinjau dari segi dimensi dan bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger.

LANDASAN TEORITIS

Pemberdayaan Perempuan

Hulme dan Turner (1990) mengatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Disamping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal (Shragge: 1993 dalam Prijono dan Pranarka:1996).

Menurut Friedman ((1992) pemberdayaan mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah suatu usaha bagaimana memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berprestasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan politik yaitu usaha untuk memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Dan yang dimaksud dengan pemberdayaan psikologis yaitu usaha bagaimana membangun kepercayaan diri.

Mengukur pemberdayaan perempuan perlu memperhatikan lima dimensi di bawah ini (Karl;1995 dalam Sukei) :

1. Dimensi kesejahteraan dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Perempuan desa yang terpenuhi kebutuhan makanan, kesehatan dan perumahan secara layak dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan. Sebaliknya apabila belum terpenuhi kebutuhan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera.
2. Dimensi akses atas sumberdaya dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya. Perempuan memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha untuk memproduksi barang atau jasa serta mendapatkan informasi untuk mengembangkan usahanya serta mengasah keterampilan maupun bakat yang dimiliki perempuan.
3. Dimensi kesadaran atau kesadaran kritis untuk mengetahui ada tidaknya upaya kesadaran terhadap adanya kesenjangan gender yang disebabkan faktor sosial budaya yang sifatnya dapat dirubah. Upaya kesadaran tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat umum maupun perempuan desa yang memiliki pemahaman kritis terhadap konsep gender. Sehingga faktor sosial budaya yang menghambat dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Kesadaran kritis tentang gender perlu dibangun secara berkelanjutan.
4. Dimensi partisipasi yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga yang terkesan elite. Perempuan desa harus ada yang duduk di lembaga elite pemerintahan desa. Sehingga dapat memyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan desa.
5. Dimensi kontrol untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan. Dimensi kontrol ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat umum maupun perempuan untuk memastikan kepentingan perempuan terwadahi di segala bidang kehidupan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini akan mampu mengantarkan pada pemahaman mendalam atas proses-proses sosial yang kompleks, yaitu menggambarkan secara mendalam pemberdayaan perempuan di

Desa Bulutengger. Fokus penelitian ini antara lain pertama, pemberdayaan masyarakat di Desa Bulutengger dideskripsikan berdasarkan dimensi kesejahteraan, dimensi akses sumber daya, dimensi partisipasi, dimensi penyadaran kritis dan dimensi kontrol. Kedua, bentuk-Bentuk pemberdayaan masyarakat meliputi aspek social, aspek politik, dan aspek psikologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara antara lain wawancara mendalam (*indepth interview*) yang terdiri dari kepala desa, ketua PKK desa, pengurus dan anggota PKK, perempuan desa, tokoh masyarakat; observasi langsung (*partisipasi pasif*), dan dokumen-dokumen yang terdiri dari Profil Desa Bulutengger, APBDes Bulutengger tahun 2015. Selanjutnya, analisa data menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman:1992) yaitu: pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelibatan perempuan dalam pembangunan desa dapat dilakukan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi kebijakan pembangunan desa. Studi kebijakan publik sebagai proses politik yang berorientasi pada akomodasi kepentingan publik harus bersinggungan erat dengan konsep demokrasi supaya terhindar dari tindakan-tindakan koruptif dan manipulatif yang bertujuan untuk kepentingan sedikit orang. Demokratisasi dalam kebijakan publik dapat memahami dan menerjemahkan makna kepentingan umum (*public interest*) serta menyelamatkan target pembangunan *policy makers* agar tidak mudah tergelincir pada tindakan-tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (*human right*) yang sangat serius (Abdul Wahab: 1999). Untuk mengetahui demokratis atau tidaknya kebijakan publik ini paling tidak berkaitan dengan tiga hal, yaitu: 1) deliberasi; 2) non-tirani; dan 3) kesamaan dalam politik. Pelibatan perempuan dalam pembangunan desa sebagai wujud demokratisasi kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan Tabel Jumlah penduduk Desa Bulutengger tahun 2015 menunjukkan jumlah polulasi penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah populasi penduduk laki-laki yaitu: Jumlah laki-laki 1.462 orang (48,3%), sedangkan jumlah perempuan 1.565 orang (51,7%) dari total 3.027 orang. Jumlah perempuan harus dilihat sebagai potensi sumberdaya manusia yang harus dibangun dan dikembangkan. Perempuan desa memiliki hak untuk menentukan masa depan yang cerah dan sejahtera. Maka dari segi kualitas dan kuantitas perempuan desa harus dilibatkan, diberi peluang dan dimotivasi supaya mampu berpartisipasi dalam pembangunan desa. Berikut merupakan data terkait jumlah penduduk Desa Bulutengger Tahun 2015 yang ditunjukkan pada Tabel 1. berikut.

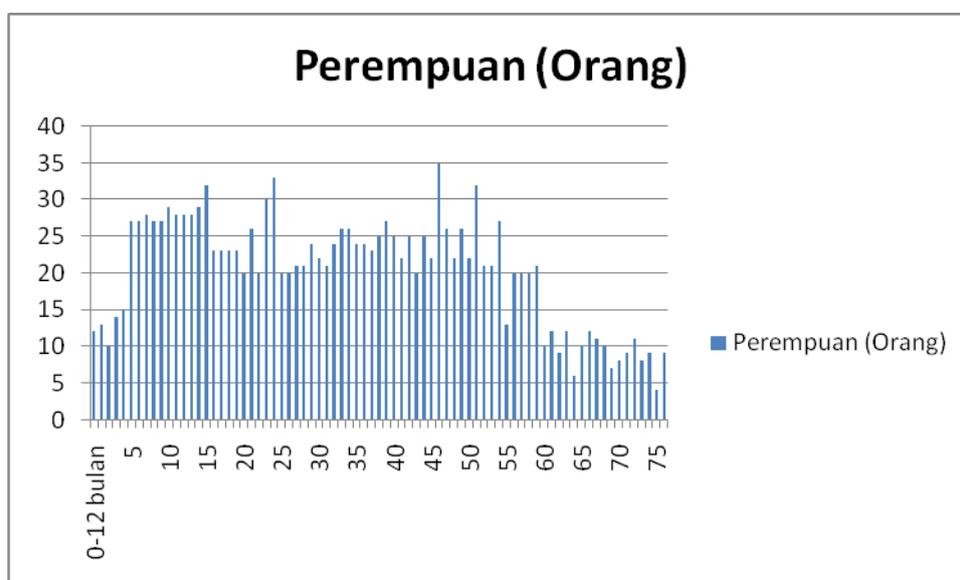
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Desa Bulutengger Tahun 2015

Jumlah laki-laki	1.462 Orang
Jumlah perempuan	1.565 Orang
Jumlah total	3.027Orang
Jumlah kepala keluarga	876 KK
Luas Desa	451,883 Ha
Kepadatan Penduduk (Jumlah Total/Luas Desa)	Per km

Sumber: Diolah oleh penulis, 2015

Tabel 2. berikut merupakan data terkait usia penduduk Desa Bulutengger Tahun 2015 yang menunjukkan jumlah perempuan usia produktif/angkatan kerja(18-56 tahun) berjumlah 927 orang (59,2%) dari total jumlah penduduk perempuan 1565. Meskipun dari jumlah tersebut ada yang merantau ke luar kota maka keberadaan perempuan di desa harus tetap dipertimbangkan sebagai warga desa yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki termasuk dalam kegiatan pembangunan desa.

Tabel 2.
Usia Penduduk Desa Bulutengger Tahun 2015



Sumber: Diolah oleh penulis, 2015

Tabel 3. berikut juga menunjukkan bahwa perempuan Desa Bulutengger usia produktif dan angkatan kerja pernah menempuh pendidikan. Dari total jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 927 orang, Jumlah perempuan Desa

Bulutengger angkatan kerja yang lulus/ tamat SD /sederajat sebanyak 472 (50,9%). Dan masih ada 32 orang (3,5%) yang pernah sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD)/sederajat tetapi tidak tamat. Data tersebut menunjukkan sebagian besar jumlah penduduk produktif/ angkatan kerja adalah lulusan SD. Keadaan tersebut semakin membuat perempuan Desa Bulutengger banyak yang menganggur karena pekerjaan sektor formal lowongan pekerjaannya terbatas.

Tabel 3.
Pendidikan Perempuan Desa Bulutengger

Tingkat Pendidikan	Perempuan (orang)
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	40
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	230
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	32
Tamat SD/sederajat	472

Sumber: Diolah oleh penulis, 2015

Dimensi-Dimensi Pemberdayaan Perempuan di Desa Bulutengger

Untuk mengetahui sejauhmana pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan di Desa Bulutengger dapat ditunjukkan melalui analisis lima dimensi di bawah ini (Karl;1995) :

1. Dimensi kesejahteraan dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Perempuan desa yang terpenuhi kebutuhan makanan, kesehatan dan perumahan secara layak dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan. Sebaliknya apabila belum terpenuhi kebutuhan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera. Berdasarkan Tabel mata pencaharian penduduk perempuan Desa Bulutengger menunjukkan sebanyak 132 orang (48,2%) petani, 88 orang (32,1%) buruh tani, 30 orang (10,9%) PNS, 4 orang (1,5%) masing-masing perawat dan pegawai swasta, 5 orang (1,8%) masing-masing pembantu RT dan pensiunan serta pengusaha kecil menengah sebanyak 6 orang (2,2%) dari total jumlah perempuan yang bekerja. Data tersebut menunjukkan mata pencaharian perempuan desa sebagian besar adalah sebagai petani dan buruh tani (sektor pertanian).

Tabel 5.
Mata Pencaharian Pokok Perempuan Desa Bulutengger

Jenis Pekerjaan	Perempuan (orang)	Prosentase (%)
Petani	132	48,2%
Buruh tani	88	32,1%
Buruh migran perempuan	0	0%
Buruh migran laki-laki	0	0%
Pegawai Negeri Sipil	30	10,9%
Pengrajin industri rumah tangga	0	0%
Pedagang keliling	4	1,5%
Peternak	0	0%
Nelayan	0	0%
Montir	0	0%
Dokter swasta	0	0%
Bidan swasta	0	0%
Perawat swasta	4	1,5%
Pembantu rumah tangga	5	1,8%
TNI	0	0%
POLRI	0	0%
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5	1,8%
Pengusaha kecil dan menengah	6	2,2%
Pengacara	0	0%
Notaris	0	0%
Dukun Kampung Terlatih	0	0%
Jasa pengobatan alternatif	0	0%
Dosen swasta	0	0%
Pengusaha besar	0	0%
Arsitektur	0	0%
Seniman/Artis	0	0%
Karyawan perusahaan swasta	0	0%
Karyawan perusahaan Pemerintahan	0	0%
Karyawan perusahaan swasta	0	0%
Jumlah Total Penduduk	274	100%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas jumlah perempuan yang bekerja 274 (29,6%) dari total jumlah angkatan kerja perempuan (927 orang). Data tersebut menunjukkan jumlah perempuan yang memiliki penghasilan sendiri masih rendah. Tabel di bawah ini menunjukkan sebagian besar perempuan desa Bulutengger adalah Ibu RT biasa yaitu berjumlah 616 orang (66,5%). Artinya perempuan Desa Bulutengger usia produktif/ angkatan kerja sebagian besar mengandalkan penghasilan dari suami (laki-Laki).

Tabel 6.
Jumlah Keadaan Angkatan Kerja Desa Bulutengger

Kelompok Usia	Jumlah (Orang)
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1849
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	60
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	616
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	146
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	6
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	3

Sumber: Diolah oleh penulis, 2015

Kondisi keluarga berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 63 KK, jumlah keluarga sejahtera 1 sebanyak 332 KK, jumlah keluarga sejahtera 2 sebanyak 162 KK sehingga total jumlahnya 557 KK (63,6 %) dari total jumlah kepala keluarga 876 KK. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan Desa Bulutengger juga masih banyak yang belum sejahtera.

Tabel 7.
Kesejahteraan Keluarga

Jumlah keluarga prasejahtera	63 KK
Jumlah keluarga sejahtera 1	332 KK
Jumlah keluarga sejahtera 2	162 KK
Jumlah keluarga sejahtera 3	145 KK
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	174 KK
Total jumlah kepala keluarga	876KK

Sumber: Diolah oleh penulis, 2015

1. Dimensi akses atas sumberdaya dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, ketrampilan dan lainnya. Perempuan memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha untuk memproduksi barang atau jasa serta mendapatkan informasi untuk mengembangkan usahanya serta mengasah ketrampilan maupun bakat yang dimiliki. Perempuan Desa Bulutengger telah memiliki akses terhadap informasi dan ketrampilan meskipun masih terbatas. Hal ini dikarenakan anggaran yang terlalu kecil untuk membiayai kegiatan perempuan di desa. Kegiatan PKK di Desa Bulutengger mendapatkan bantuan dana dari kabupaten dan kecamatan namun nilainya juga kecil. Akses terhadap modal produksi telah ada melalui kegiatan simpan pinjam wanita. Dalam

realitanya, uang tersebut tidak cukup sebagai modal usaha karena nilainya terlalu kecil yaitu maksimal pinjaman Rp 1.500.000,-. Untuk 10 kali angsuran masing-masing per bulan Rp 180,000,-

2. Dimensi kesadaran atau kesadaran kritis untuk mengetahui ada tidaknya upaya kesadaran terhadap adanya kesenjangan gender yang disebabkan faktor sosial budaya yang sifatnya dapat dirubah. Upaya kesadaran tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat umum maupun perempuan desa yang memiliki pemahaman kritis terhadap konsep gender. Sehingga faktor sosial budaya yang menghambat dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Kesadaran kritis tentang gender perlu dibangun secara berkelanjutan. Pemerintah desa, masyarakat umum di Desa Bulutengger belum mampu melakukan kesadaran terhadap kesenjangan sosial budaya yang terjadi. Hal ini dikarenakan belum ada warga desa yang memiliki pemahaman kritis terhadap kesenjangan gender yang muncul di Desa Bulutengger. Sehingga banyak pihak yang tidak mampu menangkap persoalan ini dan belum memandang pentingnya membangun dan memberdayakan potensi perempuan
 3. Dimensi partisipasi yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga yang terkesan elite. Perempuan desa harus ada yang duduk di lembaga elite pemerintahan desa. Sehingga dapat memyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan desa. Di Desa Bulutengger belum ada perempuan yang duduk di lembaga elite desa misalnya BPD, pengurus RT/RW dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan perempuan belum memiliki kepercayaan diri sehingga segan dan takut untuk berpartisipasi. Serta dukungan dan motivasi dari pemerintah desa maupun masyarakat setempat belum ada.
 4. Dimensi kontrol untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan. Dimensi kontrol ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat umum maupun perempuan untuk memastikan kepentingan perempuan terwadahi di segala bidang kehidupan. Dimensi kontrol ini di Desa Bulutengger seharusnya dijalankan BPD, tokoh masyarakat maupun masyarakat umum. Namun kesenjangan ini tidak pernah pokok perhatian utama. Apabila dimensi kontrol ini berjalan dengan baik maka akan melahirkan studi analisis evaluasi kesenjangan yang terjadi untuk kemudian merekomendasikan upaya pemecahan masalah yang ada.
-

Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Perempuan Desa Bulutengger

Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan bagi perempuan desa adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan suatu usaha bagaimana perempuan memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berprestasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Perempuan desa harus di dorong dan diberi kesempatan untuk berorganisasi. Dengan dibentuknya organisasi/kelompok maka memungkinkan terjadinya proses kerjasama dan komunikasi dalam usaha penyelesaian masalah yang dihadapi bersama. Dalam berorganisasi hendaknya tidak sekedar mengkalkulasi keuntungan ekonomi yang akan diperoleh melainkan kebersamaan. Terbentuknya Kelompok mampu membantu upaya memelihara sosial kapital di lingkungan desa. Kegiatan pertemuan yang berupa arisan, pengajian dan sebagainya merupakan sarana bagi masyarakat umum untuk berkomunikasi dan saling tukar informasi serta meningkatkan kapasitas penyelesaian masalah secara bersama. pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger pada Pemberdayaan aspek sosial meliputi kegiatan rutin PKK, arisan dan pengajian. melalui kegiatan tersebut perempuan desa mendapatkan informasi, pengetahuan maupun ketrampilan meskipun masih terbatas serta berprestasi di tingkat kecamatan melalui lomba senam. Akses terhadap sumber-sumber keuangan melalui kegiatan simpan pinjam koperasi wanita (kopwan) yang mendapatkan dana dari Gubernur Jatim Soekarwo maupun dana desa. Jumlah pinjaman yang kecil belum cukup untuk menjadi dana modal usaha, sebagian besar dipergunakan habis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perempuan Desa Bulutengger mengharapkan bantuan dana sebagai modal yang sesuai kebutuhan disambut baik oleh perempuan. Adanya bantuan yang prosesnya lebih lunak dan waktu pengembaliannya lebih lama memungkinkan bagi masyarakat untuk memutar modal tersebut supaya bisa memperoleh pendapatan atau keuntungan yang lebih besar. Dengan kesempatan usaha dan beban pengembalian yang ringan maka masyarakat akan lebih mudah untuk meningkatkan pendapatannya. Walaupun peningkatan pendapatan tetap dipengaruhi juga oleh kelancaran usahanya.

2. Pemberdayaan Politik

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan politik yaitu usaha bagaimana perempuan dapat memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Proses pembelajaran demokrasi (proses demokratisasi) pada masyarakat ditunjukkan dengan adanya

proses sharing, penyampaian pendapat, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Masyarakat dibiasakan dalam kondisi “untuk kepentingan bersama” dalam setiap tindakan yang dilakukan. Pemberdayaan politik bagi perempuan desa masih kurang. Perempuan desa belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Secara kuantitas terdapat partisipasi perempuan dalam rapat desa meskipun kecil. Namun, belum memenuhi kualitas partisipasi yang diharapkan dikarenakan secara internal perempuan Desa Bulutengger masih pasif dan kurang informasi yang mempengaruhi daya kritis perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan desa.

3. Pemberdayaan Psikologis

Pemberdayaan psikologis yaitu usaha bagaimana membangun kepercayaan diri perempuan. Pemberdayaan perempuan Desa Bulutengger pada aspek psikologis masih kurang. Perempuan desa masih kurang mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berargumentasi pada forum publik/desa. Wawasan perempuan Desa Bulutengger perlu didorong semakin terbuka pada kondisi luar desa dan akses informasi juga semakin mudah. Interaksi dengan dunia luar juga dilakukan melalui program magang dan pelatihan bagi perempuan desa. Kemudahan mengakses informasi dan keterbukaan wawasan perempuan akan membantu mempermudah perubahan pola pikir masyarakat dan perempuan pada khususnya. Mereka tidak lagi berpikir sempit tetapi dapat mengambil pengalaman yang ada diluar kehidupan mereka sebagai contoh, inspirasi dan motivasi untuk dapat lebih berkembang dan maju dan meningkatkan kepercayaan dirinya.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Dimensi-dimensi pemberdayaan perempuan Desa Bulutengger ditunjukkan dari beberapa dimensi antara lain: dimensi kesejahteraan perempuan masih ditemui perempuan yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 dan 2; dimensi partisipasi masih terbatas pada kuantitas saja belum pada kualitas artinya perempuan desa masih pasif; dimensi akses sumberdaya perempuan desa telah dapat mengakses sebagian sumberdaya tersebut meskipun masih terbatas; dan dimensi kesadaran kritis dan dimensi kontrol belum terlihat upaya pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman dan kepekaan kesenjangan gender.
-

- b. Bentuk pemberdayaan perempuan aspek sosial meliputi kegiatan rutin PKK, arisan dan pengajian. melalui kegiatan tersebut perempuan desa mendapatkan informasi, pengetahuan maupun ketrampilan meskipun masih terbatas serta berprestasi di tingkat kecamatan melalui lomba senam. Akses terhadap sumber-sumber keuangan melalui kegiatan simpan pinjam koperasi wanita (kopwan) yang mendapatkan dana dari Gubernur Jatim Soekarwo maupun dana desa. Jumlah pinjaman yang kecil belum cukup untuk menjadi dana modal usaha, sebagian besar dipergunakan habis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 - c. Bentuk pemberdayaan politik bagi perempuan desa masih kurang. Perempuan desa belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Secara kuantitas terdapat partisipasi perempuan dalam rapat desa meskipun kecil. Namun, belum memenuhi kualitas partisipasi yang diharapkan dikarenakan secara internal perempuan Desa Bulutengger masih pasif dan kurang informasi yang mempengaruhi daya kritis perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan desa.
 - d. Bentuk pemberdayaan perempuan desa pada aspek psikologis masih kurang. Perempuan desa masih kurang mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berargumentasi pada forum publik/desa.
2. Saran

Program pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger merupakan tanggung jawab bersama, diantara pemerintah dan masyarakat serta perempuan paada khususnya. Karena itu diperlukan suatu kepekaan dan kesadaran gender, utamanya dalam pembuat kebijakan/perencana pembangunan. Saran untuk peningkatan pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger adalah :

- a. Meningkatkan peluang akses sumber-sumber keuangan khususnya dana untuk modal usaha dari berbagai sumber APBDes, maupun sumber dana lain.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan perempuan desa. misalnya; pelatihan ketrampilan yang mendatangkan praktisi, studi banding ke desa lain dan lain sebagainya.
 - c. Mengembangkan produk unggulan desa berbasis kegiatan perempuan desa.
 - d. Membentuk jaringan kerjasama dengan organisasi perempuan lain.
 - e. Memberikan motivasi secara berkelanjutan supaya perempuan desa aktif dan percaya diri dalam pengambilan keputusan desa.
-

- f. Meningkatkan peluang keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan desa yang berdasarkan pada kualitas dan kuantitas perempuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1999). *Analisis Kebijakan Publik (Teori dan Aplikasinya)*. Malang: Brawijaya University Press,.
- Friedman, John. (1992). *Empowerment People: The Politic and Alternative Development*. Massachusetts Cambridge USA: Blackwell Publishers.
- Hulme, David and Marx Turner. (1990). *Sociology and Development: Theories, Policies and Practice*. London: Wheatsheaf.
- Miles, M. Matthew and Huberman A. Michael. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Prijono dan Pranaka. (1996). *Pemberdayaan (Konsep, Kebijakan dan Implementasi)*. Jakarta: CSIS.
- Sukesi, K. (1995). *Wanita dalam Perkebunan Rakyat: Hubungan Kekuasaan Pria dan Wanita dalam Perkebunan Tebu: Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
-

